

- 4) Kawasan Terbuka Hijau  
Terdapat di Kawasan perkotaan di Kabupaten Bantul.
- 5) Kawasan Rawan Bencana Alam
  - a) Kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, dan Kapanewon Kretek;
  - b) Kawasan rawan tsunami di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Kretek;
  - c) Kawasan rawan gelombang pasang meliputi Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Kretek;
  - d) Kawasan rawan banjir meliputi Kapanewon Bantul, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Jetis, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Srandakan;
  - e) Kawasan rawan gempa bumi meliputi Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Jetis, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Srandakan;
  - f) Kawasan rawan kekeringan meliputi Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, dan Kapanewon Dlingo.

6) Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya meliputi Kawasan cagar budaya Imogiri dan Kawasan cagar budaya Kerto – Pleret.

b. Rencana Pola Ruang Kawasan Budi Daya

Rencana pola ruang Kawasan budi daya terdiri atas: Kawasan peruntukan hutan produksi; Kawasan peruntukan hutan rakyat; Kawasan peruntukan pertanian; Kawasan peruntukan perikanan; Kawasan peruntukan pertambangan; Kawasan peruntukan industri; Kawasan peruntukan pariwisata; Kawasan peruntukan permukiman; Kawasan pertahanan dan keamanan; dan Kawasan peruntukan lainnya.

1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, terdapat di Kapanewon Dlingo, dengan luas 1,23 (satu koma dua tiga) hektar;

2) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat, terdapat di Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sedayu, dan Kapanewon Srandakan dengan luas 3.131,18 (tiga ribu seratus tiga puluh satu koma satu delapan) hektar;

3) Kawasan Peruntukan Pertanian, terdiri atas kawasan budi daya tanaman pangan; dan kawasan budi daya perkebunan.

a) Kawasan budi daya tanaman pangan terdiri atas kawasan lahan pangan beririgasi; kawasan lahan pangan tidak beririgasi; dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

(1) Kawasan lahan pangan beririgasi meliputi Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Jetis,

- Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Srandakan, dengan luas 12.666,53 (Dua belas ribu enam ratus enam puluh enam koma lima tiga) hektar;
- (2) Kawasan lahan pangan tidak beririgasi di Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Jetis, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Srandakan, dengan luas 8.459,93 (Delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan koma sembilan tiga) hektar.
- (3) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan terdiri atas:
- (a) Lahan pertanian pangan berkelanjutan, dengan luas 14.407,50 (empat belas ribu empat ratus tujuh koma lima nol) hektar;
- (b) Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas 4.667,51 (empat ribu enam ratus enam puluh tujuh koma lima satu) hektar.
- b) Kawasan budi daya perkebunan terdapat di Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sedayu, dan Kapanewon

- Srandakan, dengan luas 3.139,99 (tiga ribu seratus tiga puluh sembilan koma sembilan sembilan) hektar.
- 4) Kawasan Peruntukan Perikanan. Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan perikanan tangkap; dan kawasan perikanan budi daya.
    - a) Kawasan perikanan tangkap terdapat di sepanjang Kawasan pantai selatan DIY berjarak 0 (nol) sampai 12 (dua belas) mil dari garis pantai yang didukung dengan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan Depok; Pangkalan Pendaratan Ikan Kuwaru; Pangkalan Pendaratan Ikan Pandansimo; Pangkalan Pendaratan Ikan Samas; Pangkalan Pendaratan Ikan Patihan.
    - b) Kawasan perikanan budi daya terdapat di kawasan minapolitan Kapanewon Pandak dan kawasan perikanan budidaya Kapanewon Sanden.
  - 5) Kawasan Peruntukan Pertambangan. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas kawasan peruntukan pertambangan mineral logam; kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan; dan kawasan peruntukan pertambangan rakyat.
    - a) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam terdapat di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden dan Kapanewon Imogiri, dengan luas 186,09 (seratus delapan puluh enam koma nol sembilan) hektar;
    - b) Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan terdapat di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Kretek, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret,

- Kecamatan Kasihan dan Kapanewon Dlingo, dengan luas 355,39 (tiga ratus lima puluh lima koma tiga sembilan) hektar;
- c) Kawasan peruntukan pertambangan rakyat terdapat di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Kretek, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kecamatan Kasihan dan Kapanewon Dlingo dengan luas 247,42 (dua ratus empat puluh tujuh koma empat dua) hektar.
- 6) Kawasan Peruntukan Industri
- a) Kawasan peruntukan industri terdiri atas kawasan peruntukan industri di Kapanewon Piyungan dengan luas 330,50 (tiga ratus tiga puluh koma lima nol) hektar; Kawasan peruntukan industri di Kapanewon Sedayu dengan luas 188,33 (seratus delapan puluh delapan koma tiga tiga) hektar; Kawasan peruntukan industri di Kapanewon Pajangan dengan luas 72,46 (tujuh puluh dua koma empat enam) hektar;
- b) Sentra industri kecil menengah terdapat di Kapanewon Imogiri, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Bantul, Kapanewon Pundong, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Pleret, Kapanewon Sewon, Kapanewon Jetis, Kapanewon Sanden, Kapanewon Srandakan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Piyungan.
- 7) Kawasan Peruntukan Pariwisata
- Kawasan peruntukan pariwisata terdapat di kawasan Kasongan – Tembi – Goa Selarong dan sekitarnya sebagai sentra kerajinan, wisata alam, wisata kuliner dan desa

wisata; kawasan Pleret – Imogiri – Mangunan – Dlingo sebagai kawasan wisata budaya, wisata alam, kerajinan, dan desa wisata; kawasan Pantai Parangtritis – Depok – Samas – Kuwaru dan sekitarnya sebagai wisata alam, wisata pendidikan, wisata minat khusus, wisata kuliner, dan wisata dirgantara; kawasan terpadu penanda keistimewaan di perbukitan Parangtritis.

8) Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman meliputi Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Pandak, Kapanewon Bantul, Kapanewon Jetis, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Pleret, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Sewon, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Pajangan, dan Kapanewon Sedayu dengan luas 19.479,58 (sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma lima delapan) hektar.

a) Di dalam kawasan peruntukan permukiman terdapat kawasan peruntukan permukiman yang berada di dalam kawasan rawan bencana tanah longsor Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Pleret, dan Kapanewon Piyungan, dengan luas 356,87 (tiga ratus lima puluh enam koma delapan tujuh) hektar;

b) Di dalam kawasan peruntukan permukiman terdapat kawasan peruntukan permukiman yang berada di dalam kawasan rawan bencana gempa bumi di Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Pandak, Kapanewon Bantul, Kapanewon Jetis, Kapanewon Imogiri,

Kapanewon Dlingo, Kapanewon Pleret, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Sewon, Kapanewon Kasihan, dan Kapanewon Pajangan dengan luas 8.730,79 (delapan ribu tujuh ratus tiga puluh koma tujuh sembilan) hektar.

9) Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan riset dan pendidikan tinggi meliputi pengembangan kawasan riset di Kawasan Pantai Selatan dan pengembangan Kawasan pendidikan tinggi di luar Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

### **3. Kawasan Strategis Provinsi di wilayah DIY**

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya

Kawasan Strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya terdiri dari: Kawasan Strategis Kasultanan dan Kawasan Strategis Kadipaten; Di Bantul hanya ada Kawasan Strategis Kasultanan antara lain:

- 1) Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;
- 2) Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak;
- 3) Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;
- 4) Masjid Pathok Nagoro;
- 5) Pantai Samas – Parangtritis;
- 6) Kerto – Pleret;
- 7) Karst Gunungsewu.

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas:

- 1) Kawasan Perkotaan Yogyakarta terdiri atas Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman.
- 2) Kawasan Temon – Prambanan, terdiri atas Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Sleman.

- 3) Kawasan Tempel – Parangtritis, terdiri atas Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.
  - 4) Kawasan Pantai Selatan DIY terdiri atas Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo, Kawasan Pantai Selatan Bantul, dan Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul.
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis.
- 1) Kawasan Bentang Alam Karst terdapat di Kapanewon Pundong, Kapanewon Dlingo dan Kapanewon Imogiri di Kabupaten Bantul.
  - 2) Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis terdapat di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul.
- d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, yakni Kawasan Pantai Selatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dan Gelombang Laut di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul.

#### **4.2.3.3. Telaah Keistimewaan DIY**

Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten Bantul terkait erat dengan predikat keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditunjukkan dengan kekuatan-kekuatan nilai masa lalu, masa kini dan masa datang Daerah Istimewa Yogyakarta. Keistimewaan bukanlah merupakan suatu nilai yang absolut, terminal atau selesai. Keistimewaan harus diletakkan dan digerakkan di dalam dialog lorong ruang dan waktu kehidupan. Keistimewaan harus mampu menyapa dan disapa oleh nilai-nilai

baru sekaligus teguh dan konsisten berpegang pada nilai-nilai kemarin yang memberikan kekuatan bertahan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam ‘keistimewaannya’ menyusuri lorong sejarah. Dengan demikian, secara yuridis Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul yang tersusun nanti harus memiliki kapasitas “mendukung” dan “menguatkan” keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten Bantul adalah bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dimana terdapat keterkaitan dengan Kraton dan Pakulaman yang dipercaya mempunyai makna simbolik, penuh dengan nilai-nilai filosofis yang mencerminkan hubungan antar manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan pemimpinnya, dan antara manusia dengan manusia lainnya perlu dipertahankan dan dilestarikan atas dasar filosofi tradisional di bawah ini:

### **1) Hamemayu Hayuning Bawana**

Konsep Hamemayu Hayuning Bawana merupakan suatu konsep yang universal, komprehensif, sekaligus holistik. Dikatakan universal karena konsep ini mampu melintasi versi-versi nilai dari ruang dan waktu sejak HB I sampai saat ini. Dikatakan komprehensif karena konsep ini mencakup seluruh aspek kehidupan mulai dari spiritual, budaya, tata ruang, lingkungan sampai ekonomi. Dikatakan holistik, karena konsep ini mencakup tidak hanya sekedar dua dimensi kehidupan saja (ruang dan waktu), melainkan mencakup dimensi ketiga yang berupa nilai-nilai transendental.

### **2) Sangkan Paraning Dumadi**

Konsep Sangkan Paraning Dumadi berawal dari keyakinan bahwa Tuhan ialah asal-muasal dan tempat kembali segala sesuatu (Sangkan Paraning Dumadi). Dunia yang tergelar dengan seluruh isinya termasuk manusia ini berasal dari Tuhan dan kelak akan kembali kepada Tuhan (mulih mula mulanira). Dengan kekuasaannya yang tanpa batas, Tuhan menciptakan dunia beserta isinya

(jagad gedhé; makrokosmos), termasuk manusia (jagad cilik; mikrokosmos), dengan keagungan cinta kasih-Nya.

Dunia dengan segala isinya yang diciptakan Tuhan ini beraneka rupa wujudnya dan berjenjang-jenjang derajatnya. Namun demikian semua tertata dan terkait satu sama lain secara selaras, serasi, dan seimbang (harmonis). Masing-masing unsur atau komponen memiliki peran dan fungsi yang telah ditentukan secara kodrati oleh Tuhan, sehingga apabila terjadi ketidaktepatan posisi atau ketidaktepatan fungsi atas salah satu unsur atau komponen, maka terjadilah kekacauan (disharmoni).

Sangkan Paraning Dumadi menjadi landasan tata ruang dalam konsep berpikir Pangeran Mangkubumi (Sri Sultan HB-I) ketika wilayah kerajaannya. Konsep Sangkan Paraning Dumadi terungkap pada pola tata ruang berupa sumbu imajiner yang menjadi salah satu nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menonjol dalam bentuk fisik sebagai warisan budaya, yaitu berupa pola kota atau tata kota yang mengikuti sumbu imajiner Gunung Merapi – Laut Selatan.

Dengan demikian, perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Bantul nantinya ada aspek melindungi, melestarikan, menguatkan, mempertahankan, meneguhkan, dan mengembangkan satuan-satuan keunikan ruang dan tata ruang berbasis budaya untuk turut serta dalam mengungkapkan nilai-nilai dan semangat keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tata ruang di wilayah Kabupaten Bantul.

### **3) Manunggaling Kawula lan Gusti**

Ditinjau dari aspek tata ruang wilayah, Daerah Istimewa Yogyakarta ditata secara istimewa oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I dengan konsep yang tinggi dan sarat makna yang divisualisasikan dalam Warisan Budaya yang meliputi Gunung Merapi-Kraton-Laut Selatan (Samudra Indonesia). Warisan Budaya ini menggambarkan Sumbu Imajiner yang selaras dengan konsep Tri

Hita Karana dan Tri Angga (Parahyangan–Pawongan–Palemahan atau Hulu–Tengah–Hilir serta nilai Utama–Madya–Nistha). Konsep Tri Hita Karana, ada tiga unsur yang menjadikan kehidupan (fisik, tenaga, dan jiwa) telah tercakup di dalam filosofi sumbu imajiner tersebut. Konsep kosmogoni yang Hinduistis ini oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I diubah menjadi Konsep Islam-Jawa Manunggaling Kawula Gusti (Jagad Gedhe dan Jagad Cilik).

#### **4) Sumbu Imajiner Laut Selatan-Kraton-Gunung Merapi (asas harmonisasi lingkungan)**

Kabupaten Bantul dilewati oleh sumbu imajiner yaitu Gunung Merapi-Kraton-Laut Selatan. Secara filosofi sumbu imajiner ini melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya (hablun min Allah), manusia dengan manusia (hablun min Annas), manusia dengan alam yang termasuk lima anasir pembentuknya yakni api (dahana) dari gunung Merapi, tanah (bantala) dari bumi Ngayogyakarta, dan air (tirta) dari laut Selatan, angin (maruta) dan angkasa (eiter).

#### **5) Catur Gatra Tunggal**

Catur Gatra Tunggal merupakan filosofi dan konsep dasar pembentukan Inti Kota. Catur Gatra Tunggal yang memiliki arti kesatuan empat susunan yang terdiri atas: kraton, masjid, alun-alun, dan pasar adalah elemen-elemen identitas kota atau jatidiri kota yang diletakkan sebagai unsur keabadian kota. Dalam perkembangannya konsep ini dimaknai dengan elemen identitas berupa tempat ibadah, kantor pemerintahan, alun-alun dan pasar.

Catur Gatra Tunggal sebagai konsep filosofis merupakan salah satu konsep inti yang mendasari keberadaan identitas Kabupaten Bantul. Artinya konsep yang bersifat makro-filosofis dan konsep mikro-filosofis merupakan konsepsi bagi tata ruang Kabupaten Bantul.

#### **4.2.3.4. Telaah RPJMD DIY**

Visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tertuang dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, yaitu **“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”**.

Misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai berikut:

##### **1) Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban**

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan, akses infrastruktur dasar.
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan.
- c. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk halnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Indeks Gini), dan menurunkan ketimpangan antar wilayah (Index Williamson).
- d. Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman dan tertib bagi seluruh warga.

##### **2) Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;**

- a. Melakukan semangat perjumpaan dan silang birokrasi akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar SKPD).

Mendorong semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "Silang Belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: Etos, Etika, dan Kualitas. Etos, dalam konteks Trilogi SDM DIY menyanggah pesan perubahan persepsi (*mind set*) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantor, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban", yang menyanggah arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya peradaban", karena tanpa kontribusi karya pelayanan birokrasi, peradaban di DIY tentu tidak akan berkembang menjadi peradaban seperti yang dapat kita saksikan hari ini. Etika, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyanggah pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan- penyimpangan. Kualitas, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyanggah pesan adanya pergeseran *mind set*, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsi hanya sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lain di tempat lain (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi". Untuk itu, membangun birokrasi dengan "Ruh budaya karya berkualitas tinggi" akan menjadi penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lima Tahun ke depan. Ketiga aspek "Trilogi SDM-DIY", merupakan satu

kesatuan yang utuh. Negara Scandinavia dan Jepang, adalah contoh negara yang memiliki SDM dengan etos kerja tinggi, etika tinggi, dan budaya kualitas tinggi.

Isu strategis berdasarkan Peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 3 tahun 2018 tentang RPJMD DIY 2017-2022 yaitu:

### **1. Tingginya Angka Kemiskinan**

Persentase penduduk miskin 2010 sebesar 16,83 persen, turun menjadi 13,02 persen pada Maret 2017. Namun demikian, jika dibandingkan dengan kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan DIY memang masih lebih tinggi. Dalam sasaran pengurangan kemiskinan pada RPJMN 2015-2019, target tingkat kemiskinan DIY tahun 2019 adalah 7%-8%. Dengan kondisi DIY capaian saat ini per September 2017 sebesar 12.36 %, ditarget dalam RAD SDGs/TPB DIY secara bertahap diupayakan diturunkan dengan target per tahun kurang lebih 1% pertahun sehingga diharapkan pada 5 (lima)tahun mendatang Tahun 2022 turun menjadi 7 %.

Jika dilihat perkembangan pengurangan kemiskinan terdapat perbedaan karakter antar kabupaten/kota. Berdasarkan kajian dari BPS, Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi namun pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi DIY. Tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang.

### **2. Tingginya Ketimpangan Wilayah**

Ketimpangan wilayah terjadi karena kegiatan ekonomi di DIY masih terpusat di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Komposisi struktur ekonomi tiap Kabupaten/kota menarik untuk dicermati karena mencerminkan kemampuan daya saing ekonomi. Kabupaten Bantul penggerak utama perekonomian adalah sektor industri pengolahan. Melihat perbedaan karakter tersebut kebutuhan investasi di Kabupaten/kota, tantangan ke depan adalah bagaimana menumbuhkan investasi secara proporsional dengan memperhitungkan potensi yang dimiliki tiap daerah agar kesenjangan Kabupaten/kota tereliminir.

Ketimpangan di DIY tidak hanya terjadi pada sektor ekonomi saja, tetapi juga terjadi pada sektor-sektor yang lain. Dalam sektor pembangunan bidang sosial, ketimpangan dapat dicerminkan dari perbandingan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) dari masing-masing Kabupaten-kota. Penyebab ketimpangan IPM di DIY dipengaruhi kondisi kesejahteraan ekonomi yang masih timpang.

Jika dilihat ketimpangan di dalam masing-masing Kabupaten/kota, Bantul angka indeks gini tinggi. Jika dicermati, struktur ekonomi di kabupaten tersebut masih didominasi oleh Sektor Agraris. Situasi tersebut nampaknya selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Kuznet yang menyatakan bahwa kondisi ketimpangan di wilayah agraris lebih kecil dibandingkan dengan wilayah industri karena rendahnya level penghasilan yang diterima oleh individu di wilayah agraris tersebut.

### **3. Pencemaran, Kerusakan Alam, dan Risiko Bencana Alam**

Isu terkait lingkungan hidup mencakup antara lain pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah), dampak pembangunan terhadap lingkungan serta ketersediaan sumber daya air.

Hasil pemantauan kualitas udara ambien menggunakan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) tahun 2015 menunjukkan

bahwa nilai ISPU DIY sebesar 30,5 yang berada dalam kategori relatif sehat/baik.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai tahun 2015 diketahui bahwa kadar *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Dissolved Oxygen* (DO), kadar residu terlarut/*Total Dissolved Solid* (TDS), dan kandungan bahan kimia lain yang terkandung di air Sungai Tambakbayan, Sungai Oyo, Sungai Kuning, Sungai Konteng, Sungai Belik, Sungai Bedog, Sungai Gadjahwong, Sungai Code, dan Sungai Winongo telah melampaui ambang batas Baku Mutu kualitas air. Nilai BOD di sembilan sungai tersebut hampir seluruhnya telah jauh melebihi ambang batas, baik di daerah hulu, tengah, maupun hilir. Nilai COD sebagian besar sungai juga sudah melampaui ambang batas, namun nilai DO di semua bagian di sembilan sungai masih memenuhi standard baku mutu. Begitu pula untuk parameter TDS (zat padat terlarut), semua sampel air sungai masih berada di bawah baku mutu maksimum yang ditentukan.

Masih terdapat wilayah yang mengalami kekurangan air dan sebaliknya banjir yang pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan dan produktivitas penduduk.

Kawasan rawan gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan zona subduksi (kawasan tumbukan antar lempeng) di dasar Samudera Indonesia yang berada di sisi selatan DIY. Di samping itu, secara geologi, di wilayah DIY terdapat beberapa sesar yang diduga aktif. Wilayah dataran rendah yang tersusun oleh sedimen lepas, terutama hasil endapan sungai merupakan wilayah yang rentan mengalami guncangan akibat gempabumi. Kawasan rawan bencana tsunami di sepanjang pantai Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul khususnya pada pantai dengan elevasi kurang dari 30 meter dari permukaan air laut. Permasalahan di DIY dalam penanggulangan bencana adalah:

- 1) Beban kondisi fisik DIY yang rawan bencana (terdapat 12 acaman

- bencana di 301 kalurahan rawan bencana dari 438 kalurahan se-DIY).
- 2) Pengarusutamaan PRB (Pengurangan Risiko Bencana) dalam pembangunan masih perlu diterjemahkan secara lebih jelas dalam program kerja masing-masing organisasi perangkat daerah.
  - 3) Kapasitas kelembagaan yang kurang, yaitu masih rendahnya kapasitas dalam pengarusutamaan PRB dalam pembangunan di masing-masing organisasi perangkat daerah serta masih rendahnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dalam pemahaman strategi dan kebijakan pada pra, saat dan setelah bencana.
  - 4) Suprastruktur/budaya penyelenggara pemerintahan dan masyarakat belum pro- Pengurangan Risiko Bencana, paradigma masih didominasi dengan tanggap darurat serta rendahnya pemahaman tentang pentingnya data dan pemanfaatan data.
  - 5) Jejaring potensi penanggulangan bencana belum optimal, koordinasi antara *stakeholder* belum padu di dalam penanggulangan bencana, peran swasta masih di tanggap darurat dan akademisi (kampus) masih lebih dominan dalam posisi sebagai menara gading dalam penanggulangan bencana.

#### **4. Belum Optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian**

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang, hingga akhir tahun 2016, diketahui kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW pada kawasan lindung di DIY sebesar 62,74 %. Sementara itu, kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW pada kawasan budidaya adalah sebesar 66,51 %. Pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Beberapa isu

strategis terkait pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang antara lain masih maraknya alih fungsi lahan, yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Alih fungsi lahan tersebut pada umumnya adalah kawasan pertanian menjadi non pertanian. Alih fungsi lahan pertanian yang tinggi dikarenakan melonjaknya kebutuhan akan ruang untuk permukiman dan sarana pendukung kehidupan masyarakat. Sementara di sisi lain, upaya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan masih belum optimal dengan belum ditetapkannya lahan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Pada tahun 2014- 2015, lahan pertanian mengalami penurunan dari 76.26 % menjadi 76.04 %. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mengoptimalkan lahan produktif agar tidak berkurang kemampuannya (lahan-lahan produktif harus dilindungi fungsi dan pemanfaatannya melalui program PLP2B).

Berkembangnya lahan terbangun, seperti lahan permukiman, hotel, mal dan apartemen berpotensi mengurangi ruang terbuka hijau terutama di wilayah perkotaan. Dengan berkurangnya lahan terbuka hijau akan mengurangi kemampuan lingkungan untuk mereduksi pencemaran udara sekaligus mengurangi resapan air. Peningkatan lahan terbangun akan meningkatkan koefisien dasar bangunan (KDB) sehingga berpotensi mengakibatkan genangan dan banjir. Urbanisasi (proses perubahan suatu kawasan menjadi kota) juga turut mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di DIY. Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2014-2015 terjadi kenaikan persentase lahan terbangun dari 23.75 % menjadi 23.96%.

## **5. Penyediaan Infrastruktur Dasar di Kawasan Pesisir Selatan Belum Optimal**

Infrastruktur strategis merupakan prasarana yang digunakan untuk mengembangkan atau menunjang proses perbaikan kondisi di suatu wilayah, yang dalam hal ini, wilayah yang dimaksud adalah

kawasan pesisir selatan DIY. Penyediaan infrastruktur strategis di kawasan selatan bertujuan untuk menurunkan ketimpangan antar wilayah terutama pada penurunan penyimpangan PDRB di kawasan selatan terhadap PDRB di kawasan Utara (Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta), serta penurunan angka kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor yang dapat memicu perkembangan wilayah adalah konektivitas. Dengan adanya konektivitas suatu wilayah akan mudah untuk berinteraksi dengan wilayah tersebut maupun antar wilayah lainnya. Konektivitas dapat menghubungkan pusat-pusat sub wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan guna meningkatkan perkembangan wilayah. Adanya konektivitas ini memerlukan dukungan infrastruktur strategis diantaranya jalan, bandara, jalur kereta api penghubung dan TOD. Infrastruktur jalan dan konektivitas tidak dapat dipisahkan dalam perannya mempengaruhi perkembangan wilayah.

Salah satu penyediaan infrastruktur strategis di kawasan pesisir selatan yaitu Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, DIY yang dibangun di atas lahan seluas 587 hektar.

Pembangunan infrastruktur strategis lain di kawasan pesisir selatan DIY adalah pembangunan JJLS (Jaringan Jalan Lingkar Selatan). Salah satu faktor yang dapat memicu perkembangan wilayah adalah transportasi. Dengan adanya transportasi suatu wilayah akan mudah untuk berinteraksi dengan wilayah tersebut maupun antar wilayah lainnya. Transportasi dapat menghubungkan pusat-pusat sub wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan guna meningkatkan perkembangan wilayah. Adanya transportasi ini memerlukan dukungan dari infrastruktur yang ada berupa jalan.

## **6. Pengembangan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Vokasi**

Pendidikan merupakan sarana mewujudkan masyarakat DIY menjadi manusia cerdas utuh berbudaya sesuai dengan filosofi, dan ajaran moral nilai luhur Budaya. SDM adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu kualitas SDM perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang antara lain ditandai peningkatan taraf pendidikan melalui revolusi karakter siswa melalui pendidikan karakter dan perluasan pendidikan berbasis ketrampilan melalui program pendidikan kejuruan atau vokasi.

## **7. Pelestarian Budaya Baik Benda Maupun Tak Benda**

Sebagaimana tercantum dalam Visi RPJP 2005-2025, kebudayaan menjadi salah satu pilar utama pembangunan. Upaya pembangunan kebudayaan semakin intens terutama sesuai penetapan Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Semakin kuatnya upaya pemeliharaan dan pengembangan budaya benda maupun tak benda menghadapi ancaman kerusakan sejumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dipengaruhi oleh dinamika perkembangan perkotaan dan faktor alamiah. Hingga tahun 2017 Cagar Budaya dan warisan budaya yang terdiri dari benda, bangunan, situs, struktur dan kawasan cagar budaya berjumlah 2.239 buah, yang sudah mendapatkan SK sejumlah 1331, baru sejumlah 492 yang dilestarikan. Sementara itu, dalam aspek tak benda, sejumlah warisan budaya tak benda yang bersumber dari nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra telah mendapatkan pengakuan warisan budaya tak benda nasional sejumlah 40 buah dari 911 ragam budaya tak benda, sedangkan yang sudah masuk database Warisan Budaya tak benda di tingkat pusat berjumlah 246 buah. Organisasi seni dan budaya berjumlah 6293, yang dinilai telah maju karena manajemen dan kiprahnya di tingkat nasional dan internasional berjumlah 93 organisasi.

Kemajuan terbesar dalam pelestarian budaya berbasis desa dan kelurahan dengan diperbaruinya SK 325/Kpts/1995 yang menyebutkan 32 desa budaya sebagai benteng ketahanan budaya menjadi SK 262/Kep/2016 yang menyebutkan 56 desa dan kelurahan budaya.

Upaya-upaya pelestarian budaya yang mencakup legalitas dan perlindungan fisik, penguatan, serta pemanfaatan akan terus ditingkatkan untuk mencapai Visi RPJPD mendatang.

### **8. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*)**

Skor Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tahun 2016 mencapai 73,07 yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 56.69. Pencapaian tersebut menjadikan DIY sebagai salah satu provinsi terbaik dalam aspek reformasi birokrasi. Pencapaian ini tentu akan membawa DIY sebagai rujukan penerapan reformasi birokrasi. Pemerintah Daerah perlu menjaga komitmen yang kuat untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemda DIY serta perbaikan terus menerus dalam akuntabilitas kinerja pembangunan.

### **9. Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Inklusif**

Paradigma pembangunan ekonomi mengalami pergeseran, dari yang mengejar angka pertumbuhan meningkat menjadi pertumbuhan yang bersifat inklusif. Pertumbuhan yang inklusif dapat diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan yang menjamin kesetaraan akses terhadap peluang ekonomi bagi semua segmen sosial tanpa melihat keadaan masing-masing individu. Dengan demikian, pertumbuhan inklusif akan memberi rakyat miskin sebuah titik awal yang memungkinkan mereka untuk menikmati pertumbuhan ekonomi. Strategi pencapaian pertumbuhan yang inklusif dapat dicapai melalui beberapa cara, antara lain percepatan pertumbuhan yang dibarengi dengan pemerataan pertumbuhan, menghilangkan ketimpangan dengan menjamin kesetaraan terhadap

peluang, peningkatan jumlah tenaga kerja produktif, penguatan kapasitas produksi, dan juga mewujudkan sistem perlindungan sosial.

#### **4.2.4. Telaah Isu Daerah**

##### **4.2.4.1. Telaah RPJP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul Tahun 2006- 2025.

Visi Kabupaten Bantul 2006-2025, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis.**

Penekanan pada lima tahun keempat adalah pencapaian struktur perekonomian yang semakin kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif lokal yang didukung SDM berkualitas, berdaya saing dengan penerapan IPTEK yang terus meningkat.

Dalam mewujudkan visi tersebut, tahapan dan skala prioritas lima tahun keempat dalam RPJPD adalah sebagai berikut:

Tabel 4 2 Prioritas Lima Tahun Tahap Keempat RPJPD di Kabupaten Bantul 2006-2025

Misi	Tahap IV	Prioritas Tahap IV
Mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin dengan memanfaatkan sumber daya lokal, berwawasan lingkungan dan menitikberatkan pada pengurangan risiko bencana, serta berdasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, peningkatan relevansi daya saing dan pencitraan tata kelola pendidikan.</li> <li>• Pemenuhan sekolah berkualitas melalui peningkatan fasilitas pendidikan.</li> <li>• Pemenuhan kuantitas dan kualitas sekolah kejuruan untuk menciptakan lapangan pekerjaan.</li> <li>• Pengembangan pendidikan non formal dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pencari kerja sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.</li> <li>• Peningkatan kerja sama antar lembaga pendidikan, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha, maupun dunia industri dalam peningkatan mutu pendidikan;</li> </ul>
	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat dalam kesehatan, serta meningkatnya perluasan pelayanan kesehatan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan mutu sarana dan prasarana kesehatan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.</li> <li>• Penerapan budaya hidup sehat dan bersih.</li> <li>• Pemenuhan kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.</li> <li>• Pemenuhan status gizi masyarakat yang baik dan bermutu.</li> <li>• Pencegahan gangguan kesehatan, baik karena penyakit menular maupun tidak menular dapat terwujud dalam kehidupan bermasyarakat.</li> <li>• Peningkatan manajemen kesehatan.</li> <li>• Peningkatan pemakaian obat tradisional.</li> </ul>
	Peningkatan perluasan kesempatan kerja,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penciptaan wirausaha baru.</li> <li>• Pemantapan sistem rekrutmen tenaga kerja.</li> </ul>

Misi	Tahap IV	Prioritas Tahap IV
	<p>kualitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja dan transmigrasi;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sarana dan cakupan permodalan</li> <li>• Pemantapan kerjasama antar daerah di tingkat nasional termasuk transmigrasi dan kerjasama di tingkat internasional.</li> <li>• Peningkatan tenaga trampil dan produktif.</li> <li>• Perlindungan dan pengawasan terhadap tenaga kerja dan pengusaha.</li> <li>• Terpenuhiya kesehatan pekerja dan pelaksanaan hubungan industri dan pengawasan lingkungan yang kondusif.</li> </ul>
	<p>Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan guna menghadapi pasar bebas dunia sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mncapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten maju di Indonesia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemandirian unit-unit usaha industri kecl da kerajinan rakyat.</li> <li>• Terpenuhiya bahan baku secara mandiri.</li> <li>• Perluasan jangkauan pemasaran</li> <li>• Pemantapan kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak yang berkompetensi baik dalam negeri maupun luar negeri.</li> <li>• Pengembangan sistem industri, yang ramah lingkungan, dan kemandirian koperasi.</li> <li>• Pembentukan kawasan pengembangan industri kreatif yang memadai.</li> <li>• Terpenuhiya produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin ketersediaan pangan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran.</li> <li>• Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keberagaman pesona keindahan alam, budaya dan potensi daerah lainnya.</li> <li>• Pengembangan kelembagaan ekonomi guna menciptakan regulasi dan perizinan yang efisien dan efektif.</li> </ul>
	<p>Peningkatan jaringan infrastruktur yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelyanan dasar di diseluruh</li> </ul>

Misi	Tahap IV	Prioritas Tahap IV
	<p>handal, guna meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung kegiatan produksi pada kawasan-kawasan pertumbuhan baru/ kawasan strategis</p>	<p>wilayah dalam rangka kualitas kehidupan yang baik dan kesejahteraan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan penyediaan fasilitas umum berupa prasarana dan sarana transportasi, melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan yang sudah ada untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah.</li> <li>• Pemenuhan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi guna mendukung aktivitas produksi, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar, melalui konservasi, pengembangan dan pengendalian daya rusak air.</li> <li>• Pemenuhan teknologi informasi ke seluruh wilayah.</li> <li>• Terbangunnya JJLS.</li> </ul>
	<p>Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan ruang bagi kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru.</li> <li>• Peningkatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.</li> <li>• Pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan peraturan yang ada.</li> </ul>
	<p>Pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang tercermin oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum.</li> <li>• Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lidung.</li> <li>• Terpenuhinya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam;</li> <li>• Pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan di seluruh wilayah.</li> </ul>

Misi	Tahap IV	Prioritas Tahap IV
	Pengurangan risiko bencana alam melalui penataan pemukiman dan merelokasi penduduk dari wilayah rawan bencana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan dan pembangunan permukiman berbasis bencana.</li> <li>• Penguatan kelembagaan dan kemampuan seluruh masyarakat baik perempuan, anak dan usia lanjut dalam mengenali aspek bencana.</li> <li>• Penangana korban bencana alam yang cepat dan responsif.</li> <li>• Pemenuhan sarana dan prasarana sistem peringatan dini bencana.</li> </ul>
	Berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, selaras, serasi dan seimbang dalam sustu suanan yang agamis dan dmokratis.</li> <li>• Pemantapan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan dareh, membina akhlak yan mulia dan memupuk etos kerja.</li> <li>• Pemantapan kerukunan hidup beragama dengan meingkatkan rasa saling percaya, toleransi dan harmonisasi antar kelompok masyarakat.</li> <li>• Pemantapan jaminan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsunagn hidup ibu anak.</li> <li>• Terpenuhnya sarana dan prasarana panti sosial guna menampung penyandang masalah sosial.</li> </ul>
	Peningkatan prestasi olah raga dan kualitas generasi muda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhnya kualitas yang baik, sarana prasarana penunjang olahraga.</li> <li>• Pemantapan budaya olah raga dalam kehidupan di masyarakat.</li> <li>• Perluasan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemantapan kelembagaan kepemudaan yang berwawasan dan tetap berpegang teguh menjaga negara kesatuan RI.</li> <li>• Peningkatan dan mempertahankan prestasi olahraga baik tingkat regional, nasional, maupun internasional.</li> </ul>

Misi	Tahap IV	Prioritas Tahap IV
	<p>Mantapnya karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan dan pembudayaan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, selaras, serasi dan seimbang dalam suatu suasana yang agamis dan demokratis.</li> <li>• Pemantapan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan daerah, membina akhlak mulia dan memupuk etos kerja.</li> <li>• Terciptanya manusia-manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang mah Esa dan peningkatan kerukunan hidup beragama dengan meningkatnya rasa salin percaya, toleransi dan harmonis antar kelompok masyarakat.</li> </ul>
<p>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab</p>	<p>Peningkatan kapasitas perangkat daerah dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aparat pemerinah yang profesional dan lembaga pemerintah yang mantap denan berdasarkan tata kelola pememrintah yang peduli pada kepentingan rakyat.</li> <li>• Pemantapan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.</li> <li>• Pemantapan sistem tata kelola inventarisasi aset daerah.</li> <li>• Pemantapan manajemen keuangan daerah dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat serta dunia usaha.</li> <li>• Mewujudkan kepastian perlindungan, penegakkan dan pelayanan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, teratur, lancar dan berdaya saing global.</li> <li>• Kemantapan etika birokrasi, budaya kerja, pengetahuan dan pemahaman penyelenggara pemerintahan.</li> </ul>
	<p>Peningkatan</p>	<p>2. Pemantapan teknologi informasi</p>

Misi	Tahap IV	Prioritas Tahap IV
	kualitas pelayanan kepada masyarakat	dalam pelayanan public 3. Pemantapan kualitas pelayanan public sesuai dengan standar mutu pelayanan. 4. Pemenuhan sarana dan prasarana publik yang berkualitas.
	Mewujudkan ketertiban masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan kepastian hukum, ketertiban dan keamanan masyarakat</li> <li>• Pemantapan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana</li> <li>• Terciptanya kondosi yang aman, tertib, dan terkendali dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.</li> </ul>
	Menjujung tinggi HAM yang berlandaskan kesadaran menjalankan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.	Pemantapan pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan hukum dan HAM.

#### 4.2.4.2. Telaah RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011.

##### a. Telaah terhadap Rencana Struktur Ruang

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030 kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

- 1) Perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- 2) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah kabupaten.

Strategi perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi:

- 1) Menjaga keterkaitan kawasan dalam kota, antar kota, dan antara kota dengan desa;
- 2) Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
- 3) Menjadikan kawasan perkotaan sebagai pendorong dan gerbang ekonomi wilayah;
- 4) Mengembangkan pertanian menuju pertanian pangan berkelanjutan; dan
- 5) Mempertahankan dan mengembangkan pusat pertumbuhan di kawasan yang telah memberikan pelayanan secara optimal.

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat maupun udara serta mendukung industri perdagangan, dan jasa;
- b. Meningkatkan jaringan air baku untuk perumahan dan permukiman serta untuk mendorong peningkatan hasil pertanian;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan laut untuk mengembangkan potensi kelautan Bantul;
- d. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan informasi;
- e. Meningkatkan jaringan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal; dan

f. Meningkatkan jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan pengelolaan lingkungan.

Tabel 4 3 Indikasi Program Rencana Struktur Ruang

No.	Fungsi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan	
					Periode III	Periode IV
					2021 - 2025	2026 - 2030
1	Sistem perkotaan dan perdesaan	Pemantapan fungsi dan peranan Kota PKN dan PKW	Pemantapan fungsi pengembangan wilayah pada PKN, PKW dan PKL	Kapanewon Bantul, Banguntapan, Kasihan, Sewon, Sedayu, Piyungan, Imogiri, Kretek, Srandakan, Jetis, Pleret, Bambanglipuro, Dlingo, Pajangan, Pandak, Pundong dan Sanden		
		Pengembangan fungsi dan peranan Kota PKL, PPK dan PPL	Peningkatan fungsi pengembangan wilayah pada PKL, PPK dan PPL			
		Pemantapan dan pengembangan sistem pelayanan wilayah	1. Pemantapan sistem pelayanan lembaga keuangan, terutama bank dan koperasi/lembaga perkreditan	Seluruh wilayah di Kab. Bantul		
			2. Pengembangan dan Pemantapan Fasilitas dan Prasarana Perkantoran	Seluruh wilayah di Kab. Bantul		
			3. Pengembangan dan pemantapan fasilitas pendidikan (TK, SD, SMP, dan SMA)	Seluruh wilayah Kabupaten sesuai hirarki sistem pelayanan		
			4. Pengembangan dan pemantapan fungsi fasilitas kesehatan (puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, apotek, lab. klinik dan fasilitas pendukung)			
			5. Pemantapan fungsi fasilitas perdagangan (pasar harian, mingguan, toko dan warung)			
			6. Pemantapan fasilitas komunikasi (kantor pos dan fasilitas telekomunikasi lainnya)			
			Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Bimbingan Teknis dan Pelatihan SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Seluruh wilayah Kabupaten sesuai hirarki sistem pelayanan Seluruh wilayah Kabupaten sesuai hirarki sistem pelayanan	

No.	Fungsi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan	
					Periode III	Periode IV
					2021 - 2025	2026 - 2030
		Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Media Massa	Pengembangan Jaringan Pusat Komunikasi dan Informasi Masyarakat (Bintek dan Pendampingan)	Seluruh wilayah Tingkat Desa/Kalurahan Kabupaten Bantul		
		Pengembangan kawasan perdesaan berbasis agropolitan	Pengembangan fasilitas pengolahan hasil pertanian	Kapanewon Srandakan, Sanden, Dlingo, Imogiri, Bambanglipuro		
	Kapanewon Pundong, Jetis dan Pleret, Kasihan, Sewon, Bantul, Bambanglipuro					
	Kapanewon Pajangan, Sanden, Pleret					
2	Jaringan Sarana Prasarana dan Utilitas Daerah	Pengembangan jaringan jalan dan transportasi darat	1. Peningkatan jalan lokal-kolektor primer	Kapanewon Kasihan, Sewon, Bantul, Bambanglipuro, Pajangan, Sanden, Pleret		
			2. Peningkatan jalan kolektor-arteri pada ruang Nglebeng- RSU Kodya			
			3. Pembangunan jalan arteri . primer Ring Road			
			4. Pembangunan jalan arteri . primer Pantai Selatan	Pantai Selatan		
			5. Pengembangan terminal Tipe B			
			6. Peningkatan Keselamatan LL Jalan Lokal	Se Kabupaten Bantul		
			7. Pemasangan Prasarana APILL	Se Kabupaten Bantul		
			8. Pengembangan Terminal Barang	Piyungan		
			9. Pemasangan Prasarana Rambu Jl. Kolektor Sekunder	Se Kabupaten Bantul		
		Pengembangan jaringan energi	Peningkatan pelayanan jaringan listrik perkotaan dan pengembangan cakupan jaringan listrik perdesaan	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
		Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Pembangunan Pembangkit Listrik	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
		Pengembangan jaringan telekomunikasi	Peningkatan cakupan jaringan telekomunikasi satelit maupun terrestrial	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
		Pengembangan Informasi, komunikasi dan media massa	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Seluruh wilayah Kab. Bantul		

No.	Fungsi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan	
					Periode III	Periode IV
					2021 - 2025	2026 - 2030
			Pengembangan Jaringan pusat komunikasi dan informasi pembangunan daerah Penyebarluasan dan pengembangan informasi pembangunan daerah	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
		Kerjasama informasi dan media massa	Penyebarluasan dan pengembangan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
			Sosialisasi Program Kegiatan SKPD melalui Media Massa	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
		Pengembangan struktur jaringan irigasi	1. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Seluruh wilayah Kabupaten Bantul		
			2. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,	Seluruh wilayah Kabupaten Bantul		
		Pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan	1. Peningkatan jaringan drainase perkotaan	Seluruh wilayah Kabupaten Bantul		
			2. Peningkatan jaringan air minum	Se-Kabupaten Bantul		
			3. Pengembangan sistem persampahan	Se- Kabupaten Bantul		
			4. Pengembangan sistem pengolahan limbah terpusat	Se- Kabupaten Bantul		
			5. Pembangunan / Pengadaan Sarana Prasarana Sistem Permakaman	Seluruh wilayah Kabupaten Bantul		
			6. Pembangunan / Pengadaan Sarana Prasarana Sistem Pertamanan	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
		Pengembangan jaringan penerangan jalan dan lingkungan	1. Penambahan jaringan penerangan jalan pada jalan arteri dan kolektor	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
			2. Pengembangan jaringan penerangan lingkungan	Seluruh wilayah Kab. Bantul		

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , 2021

## **b. Telaah terhadap Rencana Pola Ruang**

Rencana pola ruang Kabupaten Bantul juga mengikuti arahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali serta Peraturan Daerah DIY tentang Rencana Tata Ruang DIY. Berdasarkan peraturan tersebut maka rencana pola ruang lindung Kabupaten Bantul terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan lindung geologi, serta kawasan rawan bencana alam.

Adapun rencana pola ruang budidaya Kabupaten Bantul terdiri atas kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan budidaya lainnya.

Tabel 4 4 Indikasi Program Rencana Pola Ruang

No.	Fungsi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan	
					Periode III	Periode IV
					2021 - 2025	2026 - 2030
KAWASAN LINDUNG						
1	Kawasan Perlindungan Kawasan di Bawahnya	Hutan Lindung	1 Pengendalian kegiatan dalam hutan lindung	Kec. Dlingo, Imogiri dan Sanden (hutan bakau)		
		Kawasan Konservasi dan resapan air	1. Pengendalian kegiatan pada kawasan konservasi dan resapan air, Sumur Resapan	Kec. Dlingo, Imogiri, Piyungan, Pleret, Pundong dan Kretek		
			2 . Mempertahankan luasan dan fungsi kawasan konservasi			
2	Kawasan lindung setempat	Kawasan sempadan sungai	Konservasi dan rehabilitasi sempadan sungai	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
		Kawasan sempadan pantai	Konservasi dan rehabilitasi sempadan pantai	Kapanewon Sanden, Srandakan dan Kretek		
		Kawasan sekitar mata air	Mempertahankan keberadaan dan fungsi sumber mata air	Kapanewon Kretek, Pundong, Dlingo, Piyungan, Sanden, Pandak dan Pajangan		
		Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan	1 Pemeliharaan pohon peneduh pada jalur hijau jalan	Kapanewon Kasihan, Sewon, Banguntapan, Sedayu, Piyungan dan Bantul.		
			2 Peningkatan kuantitas jumlah dan luasan RTH			
			3 Peningkatan kualitas RTH melalui penataan dan penggalakan penanaman pohon pada RTH			

No.	Fungsi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan	
					Periode III	Periode IV
					2021 - 2025	2026 - 2030
KAWASAN LINDUNG						
			4 Penunjukan, penanaman dan pemeliharaan hutan kota			
3	Kawasan suaka alam	Kawasan Cagar budaya dan ilmu pengetahuan	1 Mengendalikan kegiatan pada Cagar Budaya	Kapanewon Imogiri, Banguntapan, Kasihan, Pajangan, Pundong, Pleret, Sewon, Pandak		
			2 Pemeliharaan, perawatan dan perlindungan Cagar Budaya			
			3 Kerjasama perlindungan Cagar Budaya di Kotagede	Kapanewon Banguntapan		

No.	Fungsi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan	
					Periode III	Periode IV
					2021 - 2025	2026 - 2030
KAWASAN BUDIDAYA						
1	Kawasan peruntukan pertanian	Pengembangan pertanian	Mempertahankan luasan lahan pertanian dan pengendalian konversi lahan	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
			Pengembangan Pertanian pangan			
		Pengembangan perikanan dan peningkatan produksi	Peningkatan ketahanan pangan			
			Pengembangan pertanian perkebunan			
			Pengembangan hutan rakyat			

No.	Fungsi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan	
					Periode III	Periode IV
					2021 - 2025	2026 - 2030
KAWASAN BUDIDAYA						
			Pengembangan Kawasan Minapolitan	Kec. Pandak, Kec. Pundong, Kec. Sedayu, Kec. Piyungan, Kec. Banguntapan Kec. Sanden		
			Pengembangan SDM Perikanan	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
2	Kawasan peruntukan industri	Penetapan peraturan pengendalian untuk kegiatan industri kecil dan menengah yang tersebar di seluruh wilayah Daerah	Penyusunan perda tentang peraturan pengendalian industri kecil dan menengah			
			Pengembangan dan peningkatan kawasan industri	Penyusunan rencana pengembangan kawasan industri	Kec. Sedayu dan Piyungan	
		Peningkatan kawasan industri	Penyusunan peraturan pemberian insentif dan disinsentif kawasan industri			
			Konsolidasi pelaku industri pada kawasan industri			
			Promosi dan Penjaringan investor baru			
			5 Pembangunan dan peningkatan kawasan industri			
Pengembangan industri kecil	1 Penataan Struktur IKM					

No.	Fungsi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan	
					Periode III	Periode IV
					2021 - 2025	2026 - 2030
KAWASAN BUDIDAYA						
		dan menengah	2 Pengembangan IKM			
			3. Pengembangan koperasi sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro yang melayani KUKM yang ada di wilayah itu	Seluruh wilayah Kab. Bantul		
3	Kawasan peruntukan pariwisata	Pengembangan destinasi pariwisata	1. Pengembangan obyek pariwisata unggulan			
			2 Pengembangan tujuan wisata baru			
			3 Dukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah			
			4. Pelestarian dan Pengelolaan Benda dan Cagar Budaya			
		Peningkatan pelayanan fasilitas wisata dan akomodasi	1. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata	Kec. Banguntpan, Bantul, Imogiri, Kretek, Sanden, Srandakan, Kasihan, Pajangan		
			2. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana			
4	Kawasan peruntukan permukiman	Perencanaan dan pengendalian kawasan peruntukan permukiman	1. Penyusunan rencana pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan	Seluruh Wilayah Kab. Bantul di luar kawasan lindung		
			2. Pengembangan permukiman dengan pola Kasiba/Lisiba			

No.	Fungsi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan	
					Periode III	Periode IV
					2021 - 2025	2026 - 2030
KAWASAN BUDIDAYA						
			3. Pengembangan permukiman khusus seperti perumahan nelayan, perumahan buruh industri dan perumahan			
			4. Pengembangan dan pengendalian perumahan formal			
			5. Pengembangan dan fasilitasi perumahan swadaya			
			- Jalan Lingkungan			
			- Drainase			
			6. Pembangunan BKM sebagai permukiman strategis	Kec. Pajangan dan Kec. Kasihan		

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , 2021

### **c. Telaah terhadap Rencana Kawasan Strategis**

Dalam RTRW Bantul telah ditetapkan beberapa kawasan strategis kabupaten, yaitu:

- a. Kawasan Strategis Ekonomi Kabupaten, terdiri dari:
  - a) Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY);
  - b) Kawasan Strategis Bantul Kota Mandiri (BKM);
  - c) Kawasan Strategis Pantai Selatan, Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan;
  - d) Hasil Laut Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo;
  - e) Kawasan Strategis Industri Sedayu; dan
  - f) Kawasan Strategis Industri Piyungan.
- b. Kawasan Strategis Sosio-Kultural Kabupaten yaitu Kawasan Strategis Desa Wisata dan Kerajinan:
  - a) Gabusan –Manding – Tembi (GMT) dan
  - b) Kasongan – Jipangan – Gendeng – Lemahdadi (Kajigelem).
- c. Kawasan Strategis Lingkungan Hidup Kabupaten, yaitu:
  - a) Kawasan Strategis Agrowisata di Kapanewon Dlingo dan Agropolitan di Kapanewon Sanden, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, dan Kapanewon Dlingo; dan
  - b) Kawasan Strategis Gumuk Pasir Parangtritis yang berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.

Tabel 4 5 Indikasi Program Rencana Kawasan Strategis

No.	Fungsi	Indikasi Program	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan	
				Periode III	Periode IV
				2021 - 2025	2026 - 2030
1	Kawasan Strategis Ekonomi	Pengembangan Kawasan KonvensiPameran (MICE) Skala Internasional di kawasan JEC	KapanewonBanguntapan		
		Pengembangan Perumahan dan Permukiman berbentuk kota satelit	Kapanewon Banguntapan, Sewon dan Kasihan		
		Pengembangan kawasan industri	Kapanewon Sedayu dan Piyungan		
		Pengembangan Bantul Kota Mandiri	Kapanewon Kasihan dan Pajangan		
		Pengembangan Wisata Bahari di sepanjang pantai selatan	Kapanewon Kretek, Sanden dan Srandakan		
		Pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut	Kapanewon Kretek, Sanden, Srandakan		
2	Kawasan Strategis Sosio-Kultural	Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya dan Kerajinan pada Desa Wisata Gabusan - Manding - Tembi	Kapanewon Bantul, Sewon		
		Pengembangan Desa Wisata Cluster Kajigelem (Kasongan, Jipangan, Gendeng, Lemahdadi)	Kapanewon Kasihan, Pajangan		
		Pelesatarian Kawasan Cagar Budaya dan pengembangan wisata di kawasan sekitarnya	Kapanewon Imogiri, Banguntapan, Kasihan,		
3	Kawasan Strategis Lingkungan Hidup	Pengembangan Agrowisata	Kapanewon Dlingo, Sanden		
		Konservasi gumuk pasir	Kapanewon. Kretek, Sanden dan Srandakan		

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , 2021

Pengembangan kawasan industri menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga kerja. Percepatan perwujudan kawasan industri menjadi sangat mendesak dengan dukungan pembangunan infrastruktur penunjang kawasan seperti akses jalan.

Sejalan dengan arahan rencana struktur dan pola ruang yang ada dalam RTRW Bantul, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengarahkan Pantai Selatan DIY merupakan halaman depan provinsi. Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang mempunyai wilayah pantai sangat potensial untuk pengembangan pariwisata, pengembangan energi terbarukan, perikanan, dan konservasi alam. Untuk mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut, perlu didukung dengan penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur seperti jalur Pansela.

#### **4.2.5. Telaah KLHS RPJMD Kabupaten Bantul**

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di daerah memerlukan hasil analisis yang sistematis, menyeluruh dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah. Selain itu tentunya diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi dengan fokus utama mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, seperti arah kebijakan, rencana dan program pembangunan.

Dalam penyusunan RPJMD, KLHS menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Penyusunan KLHS RPJMD sedikit berbeda dengan penyusunan KLHS untuk dokumen kebijakan, rencana, dan/atau program lainnya. Dalam proses penyusunan KLHS RPJMD tidak

menunggu rumusan kebijakan dan program (KRP), namun tahap penyusunannya diawali dengan analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*) yang berkesesuaian dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Permendagri Nomor 7 tahun 2018 menjadi pedoman dalam penyusunan KLHS RPJMD.

Berdasarkan hasil penyusunan dokumen KLHS RPJMD Tahun 2021-2024 Kabupaten Bantul dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan 16 Tujuan TPB dan 209 indikator TPB yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten dari 17 Tujuan dan 220 indikator. Pencapaian 209 indikator TPB terdiri atas 108 indikator (52%) sudah tercapai, 66 indikator (31%) belum tercapai dan terdapat 35 indikator TPB (17%) yang tidak/belum ada data.
2. Pencapaian indikator TPB yang telah memenuhi target nasional sebanyak 108 terdiri dari 58 indikator memiliki target Nasional dan 50 indikator tidak ada target daerah. Perlu penetapan dalam program daerah untuk target dimaksud.
3. Indikator TPB yang tidak tercapai sebanyak 66 indikator perlu upaya tambahan dalam pencapaiannya, sedangkan 35 indikator tidak ada data perlu perhatian PD untuk pendataannya.
4. Penyusunan isu strategis menggunakan pertimbangan indikator tidak tercapai dan masukan saran yang disepakati dari kegiatan uji publik 1. Selanjutnya dari isu strategis dilakukan penilaian dengan mempertimbangkan PP 46 Tahun 2016 sehingga diperoleh Isu strategis prioritas dalam KLHS RPJMD Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

**a. Cakupan dan kualitas air minum serta sanitasi belum terpenuhi**

Daya dukung air di Bantul termasuk klasifikasi bersyarat, artinya ketersediaan air masih melebihi kebutuhan namun harus

diperhatikan keberlanjutannya dalam memenuhi jumlah penduduk yang semakin berkembang. Hal ini perlu menjadi perhatian karena kebutuhan air semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan kawasan resapan air justru semakin berkurang dengan alih fungsi lahan. Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum layak terus dilakukan seiring peningkatan jumlah penduduk, namun persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan belum mencapai 100%, baru mencapai 96,81%.

Kabupaten Bantul didominasi oleh jasa ekosistem pengatur pengolahan dan pengurai limbah (JER 5) kelas rendah dengan luas 15.833,99 Ha atau 31,24%, yaitu pada kawasan permukiman. Klasifikasi ini menggambarkan bahwa kemampuan alam untuk pengaturan pengelolaan limbah adalah rendah. Volume sampah yang dihasilkan lebih banyak serta mengandung bahan kimia atau berbahaya, tidak mampu dikelola secara alami oleh alam sehingga memerlukan bantuan manusia. Potensi timbulan sampah yang dihasilkan penduduk Kabupaten Bantul sebesar 608.731,64 m<sup>3</sup>/th Jumlah yang tertangani sebanyak 452.185,43 m<sup>3</sup>/th atau 74,28%.

Sementara itu, untuk produk limbah yang dihasilkan yang tertangani dengan baik sebanyak 84,83%, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan baru mencapai 80%, baru 56 kalurahan di Bantul yang sudah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Kabupaten Bantul belum memiliki Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT).

Atas dasar hal tersebut, permasalahan kualitas air minum dan sanitasi menjadi perhatian serius karena membawa dampak secara luas dan mengancam keberlanjutan kehidupan dan lingkungan.

### **b. Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana**

Wilayah kabupaten Bantul, berdasarkan perhitungan IRBI secara umum merupakan wilayah dengan risiko bencana tinggi sekali, yaitu 187,02. Potensi risiko bencana yang dimiliki sebanyak 9 (Sembilan) potensi risiko dengan risiko tinggi masing-masing. Sembilan potensi ini menjadi ancaman yang harus dihadapi dan diantisipasi oleh masyarakat, dengan jumlah korban akibat bencana mengalami kenaikan pada tahun 2019 dibanding tahun 2018.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan dan upaya penyiapan dan pengurangan risiko yang terjadi. Upaya ini menjadi penting karena dampak bencana dimaksud sangat besar dan mengancam banyak orang.

### **c. Penurunan kualitas lingkungan hidup**

Pertumbuhan penduduk membawa konsekuensi terhadap peningkatan aktivitas manusia dan hasil yang dikeluarkan di lingkungan. Produk yang dihasilkan dari aktivitas dan dikeluarkan di lingkungan merupakan limbah dan sampah yang harus dikelola sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Kualitas lingkungan hidup tercermin dari capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2019 sebesar 60,40 yaitu cukup baik ( $60 < \text{IKLH} \leq 70$ ). IKLH dipengaruhi oleh kualitas air, udara dan tutupan lahan, namun capaian kualitas air masih belum baik. Proporsi luas lahan kritis yang tertangani baru mencapai 5,5% dari luas lahan kritis seluas 477,75 ha.

Selain kualitas lingkungan hidup, ekosistem dan keanekaragaman hayati perlu mendapat perhatian salah satunya keberadaan ekosistem mangrove, ekosistem gumuk pasir. Keberadaan gumuk pasir ini mulai terganggu dengan semakin banyaknya aktifitas manusia di sekitar gumuk. Kondisi

saat ini hanya 9 % area gumuk dalam kondisi baik, 41% kondisi sedang, 50% kondisi buruk.

#### **d. Alih fungsi lahan**

Alih fungsi lahan merupakan sebuah konsekuensi dari berkembang wilayah dan pertumbuhan penduduk. Namun jika tidak terkendali akan berdampak luas dalam pengembangan wilayah. Alih fungsi lahan dalam kurun lima tahun terakhir mencapai 34 Ha/tahun, sedangkan daya dukung pangan semakin menurun dari 1,57 pada tahun 2015 menjadi 1,43 pada tahun 2019. Dan prediksi pada tahun 2024 menjadi 1,34 dengan asumsi luas lahan LP2B tetap dipertahankan yaitu 14.407,50 ha. Alih fungsi lahan dan peningkatan aktivitas manusia akan membawa akibat penurunan kualitas lingkungan. Hal ini harus menjadi perhatian serius karena apabila hal ini tidak terkendali maka akan membawa dampak serius bagi kelanjutan lingkungan.

#### **e. Tingginya angka kemiskinan**

Bahwa mengurangi angka kemiskinan masih menjadi agenda utama dalam setiap proses pembangunan, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Hal ini disebabkan, penurunan angka kemiskinan merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan sebuah proses pembangunan suatu wilayah. Kabupaten Bantul, berdasarkan data terakhir dari BPS, masih memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 12,43%. Namun, dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan akan membawa dampak serius dalam peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul. Tingginya angka kriminalitas berpengaruh pada kejadian kriminalitas di Kabupaten Bantul.

#### **f. Ketimpangan Pendapatan**

Proses pembangunan ditujukan untuk mencapai kemajuan bagi seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Keberhasilan proses pembangunan daerah sesungguhnya tidak hanya diukur dari kenaikan pendapatan daerah. Hal tersebut belum mampu memberikan jaminan meningkatnya pendapatan masyarakat, karena pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran kenaikan pendapatan daerah telah mengakibatkan lebarnya kesenjangan masyarakat baik antar wilayah maupun dalam suatu wilayah.

Ketimpangan pendapatan masyarakat yang tercermin dari angka gini rasio pada tahun 2014-2018 yang menunjukkan kecenderungan naik. Pada tahun 2018, angka Gini Rasio mencapai 0,448, hampir mendekati ambang batas bawah kesenjangan tinggi yaitu 0,50 – 0,70.

#### **g. Ketimpangan Wilayah**

Pengembangan sebuah wilayah merupakan suatu perubahan yang tidak dapat dihentikan. Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan penduduk, maka akan membawa konsekuensi terhadap pengembangan wilayah. Namun, hal yang perlu diperhatikan dan menjadi perhatian adalah agar pengembangan dimaksud merupakan pengembangan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kualitas lingkungan.

Proses pembangunan ditujukan untuk mencapai kemajuan bagi seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Namun, tujuan tersebut belum mampu diwujudkan. Perbedaan kemajuan masih terjadi baik antar wilayah maupun antar lapisan masyarakat. Ketimpangan wilayah terjadi karena kegiatan ekonomi masih terpusat di kapanewon perkotaan di Kabupaten Bantul, yaitu Kapanewon Bantul, Kapanewon

Sewon, Kapanewon Kasihan dan Kapanewon Banguntapan. Kemajuan wilayah perkotaan belum mampu membawa dampak kemajuan wilayah perdesaan. Hal ini terpoteret dari persebaran masyarakat miskin yang banyak terdapat di wilayah perdesaan. Maka perlu mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru, meningkatkan aksesibilitas antar wilayah yang menunjang perekonomian, dan mengembangkan SDM unggul.

KLHS RPJMD memberikan rekomendasi program agar penyusunan RPMJD sesuai dengan aspek pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi berupa program dalam Permendagri 90 tahun 2019.

Tabel 4 6 Tabel Rekomendasi Program KLHS RPJMD

<b>Isu Strategis KLHS</b>	<b>Rekomendasi Program</b>
Cakupan dan kualitas air minum serta sanitasi belum terpenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>• Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</li> <li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)</li> <li>• Program Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA)</li> <li>• Program Pengelolaan Persampahan</li> </ul>
Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penanggulangan Bencana</li> <li>• Program Penanggulangan Kebakaran</li> <li>• Program Penanganan Bencana</li> </ul>
Penurunan kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li> <li>• Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</li> <li>• Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</li> </ul>
Alih fungsi lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</li> </ul>

Isu Strategis KLHS	Rekomendasi Program
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> </ul>
Tingginya angka kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</li> <li>• Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</li> <li>• Program Perlindungan Perempuan</li> <li>• Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)</li> <li>• Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</li> <li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Program Peningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum</li> <li>• Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia</li> <li>• Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</li> <li>• Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga</li> <li>• Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</li> </ul>
Ketimpangan Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</li> <li>• Program Penempatan Tenaga Kerja</li> <li>• Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</li> <li>• Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</li> <li>• Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</li> <li>• Program Pemasaran Pariwisata</li> <li>• Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</li> <li>• Program Pengembangan Ekspor</li> <li>• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</li> <li>• Program Pengembangan UMKM</li> <li>• Program Promosi Penanaman Modal</li> <li>• Program Hubungan Industrial</li> <li>• Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Kerjasama Daerah)</li> <li>• Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</li> <li>• Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota</li> <li>• Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</li> </ul>
Ketimpangan Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Pendidikan</li> </ul>

Isu Strategis KLHS	Rekomendasi Program
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Program Perlindungan Dan Jaminan</li> <li>• Program Pelatihan Tenaga Kerja Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar Kerja</li> <li>• Program Aplikasi Informatika</li> <li>• Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Kerjasama Daerah)</li> <li>• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</li> <li>• Program Pengembangan UMKM</li> <li>• Program Penempatan Tenaga Kerja</li> </ul>

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Bantul, 2020.

#### 4.2.6. Telaah RPJMD Daerah Sekitar

Dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Bantul meninjau kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen RPJMD masing-masing kabupaten/kota.

Berikut ini disajikan telaahan RPJMD beberapa kabupaten/kota tetangga Kabupaten Bantul.

Tabel 4 7 Tabel Identifikasi RPJMD Daerah Lain

No	Periode RPJMD/ Visi	Misi	Sasaran	Keterkaitan
1	YOGYAKARTA 2017-2022  "Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan	Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	<p>Keberhasilan kebijakan sektor pertanian Kabupaten Bantul dapat menyebabkan surplus pangan dan mempengaruhi ketahanan pangan daerah sekitar Bantul, termasuk Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta bisa dikatakan tidak memiliki lahan pertanian. Pasokan pangan berasal dari luar Kota Yogyakarta.</p> <p>Pembangunan jaringan irigasi yang merata dan perbaikan sistem tata guna air merupakan salah satu arah kebijakan pembangunan pertanian yang akan ditempuh. Sistem tata guna air di Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh sistem tata guna air di Kota Yogyakarta terutama pada Daerah Irigasi Lintas. Kualitas dan kuantitas air pada jaringan irigasi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi di hulunya, sebelum masuk ke areal persawahan di Kabupaten Bantul.</p>
		Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Kota Yogyakarta	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Upaya untuk menurunkan ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Bantul antara lain dengan strategi perlindungan produk lokal dan pengembangan jaringan pemasaran melalui modernisasi pasar rakyat. Produk lokal yang dihasilkan UMK diharapkan mampu bersaing bahkan dapat memasuki pasar Yogyakarta, sedangkan modernisasi pasar rakyat diharapkan mampu bersaing dengan pasar modern yang berkembang pesat di Kota Yogyakarta.

No	Periode RPJMD/ Visi	Misi	Sasaran	Keterkaitan
				Disamping itu, pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat melalui peningkatan promosi dan kerjasama pariwisata. Kerjasama pariwisata dengan Kota Yogyakarta diharapkan agar ada sinergi pada pakert-paket kunjungan wisata lintas wilayah.
			Investasi di Kota Yogyakarta meningkat	Meningkatnya investasi di Kota Yogyakarta mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bantul. Banyak tenaga kerja dari Kab. Bantul yang bekerja di Kota Yogyakarta.
		Memperkuat Moral, Etika, dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Gangguan trantibum di Kota Yogyakarta dapat berpengaruh pada daerah perbatasan, dan sebaliknya. Kejadian "klithih" sering terjadi di daerah perbatasan. Sehingga dibutuhkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan trantibum .
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya	Kualitas pendidikan meningkat	Peningkatan kualitas pendidikan melalui strategi peningkatan daya saing pendidikan, agar mampu bersaing dengan kualitas pendidikan Kota Yogyakarta. Diharapkan masyarakat Bantul lebih memilih bersekolah yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.
			Harapan hidup masyarakat meningkat	Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga. Warga Kabupaten Bantul yang bertempat tinggal di perbatasan memeriksakan kesehatan pada fasilitas

No	Periode RPJMD/ Visi	Misi	Sasaran	Keterkaitan
				<p>kehatan di Kota Yogyakarta.</p>
			Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Adanya kesamaan budaya antara masyarakat Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Bersama-sama untuk melindungi tradisi dan adat istiadat untuk mendukung kebudayaan istimewa.
		Memperkuat Tata Kota dan Kelestarian Lingkungan	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	<p>Perlu upaya yang kuat untuk meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang. Kota Yogyakarta memiliki lahan yang sangat terbatas. Sehingga banyak pekerja Kota Yogyakarta memilih tempat tinggal di luar Kota Yogyakarta.</p> <p>Hal ini mengkhawatirkan keberadaan lahan pertanian terutama di wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta.</p> <p>Diperlukan upaya yang kuat dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bantul, agar tidak beralih ke fungsi yang lain.</p>
			Kualitas lingkungan hidup Meningkat	<p>Kualitas lingkungan hidup dipengaruhi oleh kualitas air, udara dan tutupan lahan.</p> <p>Air dari Kota Yogyakarta mengalir menuju hilir yaitu wilayah Kabupaten Bantul. Apabila kondisi air sungai buruk mempengaruhi kondisi air di Kabupaten Bantul.</p> <p>Disamping itu, sampah dari Kota Yogyakarta dibuang di TPA/TPST Reg Piyungan yang berada di Kabupaten Bantul. Sedangkan limbah cair domestik dialirkan pada IPAL Terpusat Sewon yang juga berada di</p>

No	Periode RPJMD/ Visi	Misi	Sasaran	Keterkaitan
				<p>Kabupaten Bantul.</p> <p>Diperlukan kesadaran warga Kota Yogyakarta dalam mengelola sampah dan limbah cair domestiknya untuk lebih bjiak, agar tidak menyebabkan semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bantul</p>
		Membangun Sarana dan Prasarana Publik dan Permukiman	Infrastruktur wilayah meningkat	<p>Pembangunan infrastruktur terutama di wilayah perbatasan diperlukan koordinasi lintas kabupaten/kota agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antar wilayah tersebut.</p> <p>Kerjasama penanganan jalan, transportasi, penyediaan air bersih dan drainase difasilitasi oleh Sekretariat Bersama Kartamantul.</p>
2	KULON PROGO 2017-2022 "Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa."	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan	Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda	Adanya kesamaan budaya antara masyarakat Kulon Progo dan Bantul. Bersama-sama untuk melindungi tradisi dan adat istiadat untuk mendukung kebudayaan istimewa.
		Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo secara langsung maupun tidak langsung bagi Kabupaten Bantul. Pembangunan JJLS merupakan jalur alternative dari dan ke Bandara, wilayah Pantai Selatan Kabupaten Bantul semakin terbuka.

No	Periode RPJMD/ Visi	Misi	Sasaran	Keterkaitan
3	SLEMAN 2020-2026 Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong	Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas	Terkelolanya lingkungan hidup dalam rangka Pembangunan yang berkelanjutan	<p>Di DIY, Sleman merupakan daerah hulu, yang banyak memiliki sumber mata air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Bantul merupakan daerah hilir, dimana air yang diterima dalam kualitas dan kuantitasnya sudah menurun. Hal ini menyebabkan kondisi sungai di wilayah Bantul memiliki kualitas yang tidak baik.</p> <p>Disamping itu, sampah dari Sleman dibuang di TPA/TPST Reg Piyungan yang berada di Kabupaten Bantul. Sedangkan limbah cair domestik dialirkan pada IPAL Terpusat Sewon yang juga berada di Kabupaten Bantul.</p> <p>Diperlukan kesadaran warga Sleman dalam menjaga tutupan lahan di daerah hulu agar sumber mata air tetap terjaga. Disamping itu dalam mengelola sampah dan limbah cair domestiknya untuk lebih bijak, agar tidak menyebabkan semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bantul.</p>
		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.	Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat	Prasarana olahraga di Kabupaten Sleman relative lebih banyak. Masyarakat Bantul di daerah perbatasan untuk meningkatkan prestasi keolahragaan memilih mengikuti club olahraga Sleman.
		Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan.	Meningkatnya produktivitas pertanian	Sistem tata guna air di Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh sistem tata guna air di Kabupaten Sleman sebagai daerah hulu terutama pada Daerah Irigasi Lintas. Kualitas dan kuantitas air pada jaringan irigasi ini sangat dipengaruhi

No	Periode RPJMD/ Visi	Misi	Sasaran	Keterkaitan
				oleh kondisi di hulunya, sebelum masuk ke areal persawahan di Kabupaten Bantul.
		Menguatkan budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong.	Meningkatnya pelestarian warisan budaya	Adanya kesamaan budaya antara masyarakat sleman dan Bantul. Bersama-sama untuk melindungi tradisi dan adat istiadat untuk mendukung kebudayaan istimewa.
4	GUNUNGKIDUL 2020-2026 Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026	Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Perekonomian Masyarakat Meningkat	Gunung Kidul memiliki Pelabuhan Perikanan Sadeng. Aktivitas perikanan di Pelabuhan ini berjalan cukup baik mengingat lokasinya berada di teluk. Kapal-kapal nelayan Bantul mendarat di pelabuhan ini, mengingat Bantul tidak memiliki pelabuhan perikanan. Hanya perahu saja yang dapat mendarat di pantai Bantul.  Disamping memiliki Pelabuhan Perikanan, Gunung Kidul juga memiliki wisata alam pantai yang indah dengan kunjungan wisatawan yang semakin meningkat. Agar dapat bersaing dengan pantai Gunung Kidul, Bantul harus segera meningkatkan pengelolaan pantainya.

#### **4.2.7. Isu Strategis Kabupaten Bantul**

Berdasarkan telaah permasalahan pembangunan daerah, dokumen perencanaan kabupaten/ kota sekitar dan isu-isu strategis internasional, nasional dan provinsi DIY, maka dirumuskan isu strategis Kabupaten Bantul sebagai berikut:

##### **1) Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh pertumbuhan jasmani, kemampuan intelektual dan mental spiritual. Masing-masing unsur diuraikan sebagai berikut:

- **Pertumbuhan jasmani**

Pertumbuhan jasmani dicapai dengan memperhatikan kualitas kesehatannya dari masa sebelum dilahirkan. Kualitas gizi manusia sejak di dalam kandungan sampai masa-masa pertumbuhan selanjutnya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jasmani dan kecerdasan. Keselamatan ibu melahirkan dan bayinya perlu mendapat perhatian. Di Kabupaten Bantul masih terjadi kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan kasus balita stunting.

Kematian ibu masih terjadi. Angka Kematian Ibu melahirkan tahun 2020 mencapai 157,6 per 100.000 kelahiran hidup, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena kurangnya deteksi dini kondisi ibu hamil yang diakibatkan keterbatasan akses pelayanan kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

Kematian bayi masih terjadi. Angka Kematian Bayi mencapai 6,93 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2020.

Balita dengan kasus gizi buruk sebanyak 57 kasus pada tahun 2020. Gizi buruk dapat mengarah pada stunting. Angka prevalensi stunting kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,74%.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya upaya optimalisasi pelayanan pada 1000 hari pertama kehidupan. Perhatian pada ibu, bayi dan balita perlu ditingkatkan untuk mendapatkan SDM yang berkualitas melalui optimalisasi peran POSYANDU.

Disamping upaya kesehatan, anak membutuhkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak terutama dari tindak kekerasan. Dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak Kabupaten Bantul berkomitmen menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA), namun saat ini pada kategori madya, 11 Kecamatan/Kapanewon Layak Anak (Kelana), dan 13 Desa/Kalurahan Layak Anak (Delana) dan terdapat 11 Forum anak tingkat kecamatan/kapanewon.

- **Kemampuan intelektual**

Kemampuan intelektual seseorang ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diperolehnya. Kualitas pendidikan di Kabupaten Bantul belum merata dilihat dari kualitas lembaga pendidikan dan tenaga pendidik.

Kualitas lembaga pendidikan ditentukan oleh pencapaian akreditasi yang dikeluarkan oleh BANSN, dengan hasil SD: 84,06%, MI: 72,72%, SMP: 68,82% dan MTS: 72,00%.

Kualitas tenaga pendidik dapat dilihat dari banyaknya guru bersertifikat. Guru bersertifikat pada jenjang PAUD: 58%, SD: 50,71%, MI: 43,7%, SMP: 64,42% dan MTS: 50,07%.

Perlunya optimalisasi pelaksanaan PAUD untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal demi mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif.

Kualitas SDM yang baik menentukan keberhasilan dalam memperoleh pekerjaan. Pada Tahun 2020 proporsi usia kerja sebesar 69,35%, sedangkan proporsi bukan usia kerja 30,65%

sehingga rasio ketergantungannya 44,20. Kabupaten Bantul berada dalam masa bonus demografi sehingga dapat menikmati dekade *Window of Opportunity* atau jendela kesempatan. Pemanfaatan peluang ini dapat dimanfaatkan dengan prasyarat iklim investasi kondusif untuk membuka kesempatan kerja produktif serta terdapat sumber daya pemerintah untuk investasi pendidikan dan peningkatan kualitas SDM.

Namun kondisi saat ini kualitas tenaga kerja yang ada belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja. Tahun 2020 pencari kerja yang dapat ditempatkan baru mencapai 86,62%.

- **Kemampuan mental spiritual**

Kemampuan mental spiritual adalah kemampuan yang berkaitan dengan etika, perilaku, sikap, serta fungsi mental manusia secara ilmiah. Kemampuan mental spiritual dapat dilihat dari:

- Ketaatan dalam menjalankan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta toleransi yang tinggi dalam kehidupan beragama.
- Memiliki semangat yang tinggi dan kejuangan yang tangguh, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat.

Potensi intoleransi antar umat beragama di Kabupaten Bantul masih ada mengingat beragamnya agama yang dianut masyarakat. Kasus intoleransi merupakan isu sensitif di masyarakat sehingga menjadi perhatian untuk penanganannya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi dua kasus intoleransi yaitu pada tahun 2019.

Masalah lain yang perlu mendapat perhatian adalah adanya kenakalan remaja berupa kasus “Klithih” yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat.

## 2) Masih Tingginya Ketimpangan

Ketimpangan suatu daerah dapat dilihat dari ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah.

### • Ketimpangan pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari indeks gini. Data tahun 2016-2020 tren perkembangan indeks Gini di Kabupaten Bantul berbentuk kuadratik. Pada tahun 2020 angka indeks Gini membaik pada 0,418. Nilai ini masuk dalam kategori ketimpangan “moderat” (0,3-0,5), namun perlu diwaspadai karena mendekati ambang batas ketimpangan “tinggi” (di atas 0,5).

Ketimpangan pendapatan pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Pengurangan angka kemiskinan masih menjadi agenda utama dalam setiap proses pembangunan. Kabupaten Bantul pada tahun 2020 memiliki 13,5% jumlah penduduk miskin, meningkat dari tahun 2019 sebesar 12,92%. Hal ini sebagai akibat dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan dan membawa dampak serius dalam peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul.

Upaya peningkatan pelayanan bagi warga miskin perlu dilakukan dengan mengembangkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan guna mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial yang komprehensif dan integratif. Di tingkat desa, perlu pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Pukesos). Integrasi SLRT dengan Pukesos bisa menjadi sistem yang membantu masyarakat dan pemerintah daerah, untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.

Salah satu upaya untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan adalah pengembangan industri kreatif. Komoditas industri kreatif yang diproduksi antara lain *furniture*, gerabah, batik, tatah sungging, produk kulit, batik kayu, perak, anyaman, keris dan fashion. Produk-produk tersebut rata-rata dibuat oleh *home industry*. Kualitas industri kreatif Kabupaten Bantul belum optimal. Cakupan Industri kreatif baru mencapai 46,20 % pada 2020 meningkat dari 39,5% di tahun 2016.

Industri kreatif mampu memberi nilai tambah pada daya tarik dan daya saing pariwisata. Industri kreatif dan sektor pariwisata telah membentuk hubungan simbiosis mutualisme.

Pada tahun 2020 kunjungan wisatawan menurun menjadi 2.348.313 wisatawan dari 5.166.615 wisatawan pada tahun 2019, akibat pandemic covid-19. Perlu upaya untuk memulihkan kunjungan wisatawan pada saat pandemic berakhir dengan menjadikan Kabupaten Bantul menjadi Kabupaten Kreatif.

Untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Kreatif, selain sektor industri dan sektor pariwisata di atas, sektor pertanian perlu dioptimalkan terutama dalam penyediaan bahan baku kuliner.

- **Ketimpangan wilayah**

Ketimpangan wilayah adalah perbedaan performa ekonomi dan kesejahteraan antar wilayah. Ketimpangan wilayah terjadi karena kegiatan ekonomi masih terpusat di kapanewon perkotaan di Kabupaten Bantul, yaitu Kapanewon Bantul, Kapanewon Sewon, Kapanewon Kasihan dan Kapanewon Banguntapan. Kemajuan wilayah perkotaan belum mampu membawa dampak kemajuan wilayah perdesaan. Hal ini terpotret dari persebaran masyarakat miskin yang banyak terdapat di wilayah perdesaan. Maka perlu mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru,

meningkatkan aksesibilitas antar wilayah yang menunjang perekonomian.

Kabupaten Bantul dibagi menjadi 4 bagian wilayah perkotaan, yaitu (1) Wilayah Kapanewon Bantul, Kasihan, Sewon dan Banguntapan sudah tergabung dalam sebuah Aglomerasi Perkotaan yang sangat terikat dengan Kawasan Perkotaan Yogyakarta, (2) Wilayah Pantai Selatan yang merupakan kawasan pengembangan pariwisata dan keistimewaan di Samas dan Parangtritis, terhubung dengan JJLS, (3) wilayah Bantul Barat dan (4) wilayah Bantul Timur.

Penyediaan infrastruktur jalan untuk mendukung 4 bagian wilayah perkotaan di atas perlu mendapat perhatian terutama pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bantul yang meliputi Jalan Samas, Jalan Imogiri, Jalan Jogja Wonosari, dan Jalan Ringroad Timur yang merupakan jalan utama menuju pusat kegiatan/pelayanan. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020 sebanyak 1.796 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 136 jiwa dan luka ringan sebanyak 2.087 jiwa, artinya rata-rata dalam satu hari terjadi lebih dari 4 kejadian dengan korban lebih dari 6 orang.

Pada penyediaan infrastruktur pelayanan publik saat ini belum sepenuhnya ramah difabel, baru sedikit kantor pelayanan public sudah ramah difabel.

Dalam upaya terwujudnya pemukiman yang bersih dan sehat pengembangan sarana prasarana sanitasi perlu menjadi perhatian. Saat ini produk limbah domestik yang dihasilkan dan tertangani dengan baik sebanyak 84,83%, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan baru mencapai 80%, baru 56 kalurahan di Bantul yang sudah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Kabupaten Bantul belum memiliki Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT).

Daya dukung air di Bantul termasuk klasifikasi bersyarat, artinya ketersediaan air masih melebihi kebutuhan namun harus diperhatikan keberlanjutannya dalam memenuhi jumlah penduduk yang semakin berkembang. Hal ini perlu menjadi perhatian karena kebutuhan air semakin meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan kawasan resapan air justru semakin berkurang dengan alih fungsi lahan. Upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum layak terus dilakukan seiring peningkatan jumlah penduduk, namun persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan belum mencapai 100%, baru mencapai 96,81%.

Tahun 2021 terdapat 6.381 rumah masuk kategori RTLH. Dari jumlah tersebut 3.792 sudah tertangani, tersisa 2.589. Pembangunan RTLH harus berlanjut agar semua rumah layak huni.

### **3) Adanya ancaman keberlanjutan lingkungan hidup**

#### **• Degradasi lingkungan,**

Degradasi lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan hidup dapat dilihat terjadi akibat pertumbuhan penduduk membawa konsekuensi terhadap peningkatan aktivitas manusia dan hasil yang dikeluarkan di lingkungan. Produk yang dihasilkan dari aktivitas dan dikeluarkan di lingkungan merupakan limbah dan sampah yang harus dikelola sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Kualitas lingkungan hidup tercermin dari capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020 sebesar 63,02 yaitu cukup baik ( $60 < \text{IKLH} \leq 70$ ), IKLH dipengaruhi oleh kualitas air, udara dan tutupan lahan. Capaian kualitas air masih belum baik. Perlu upaya untuk meningkatkan capaian IKLH. Proporsi luas lahan kritis yang tertangani baru mencapai 5,5% dari luas lahan kritis

seluas 477,75 ha. Terbatasnya lahan ruang terbuka hijau perkotaan, baru mencapai 14,34% sedangkan aturan dalam UU sebesar 20%.

Alih fungsi lahan merupakan sebuah konsekuensi dari berkembang wilayah dan pertumbuhan penduduk. Namun jika tidak terkendali akan berdampak luas dalam pengembangan wilayah. Alih fungsi lahan dalam kurun lima tahun terakhir cukup tinggi, sedangkan daya dukung pangan semakin menurun dari 1,57 pada tahun 2015 menjadi 1,43 pada tahun 2019. Dan prediksi pada tahun 2024 menjadi 1,34 dengan asumsi luas lahan LP2B tetap dipertahankan yaitu 14.407,50 ha. Alih fungsi lahan dan peningkatan aktivitas manusia akan membawa akibat penurunan kualitas lingkungan. Hal ini harus menjadi perhatian serius karena apabila hal ini tidak terkendali maka akan membawa dampak serius bagi kelanjutan lingkungan.

Kabupaten Bantul didominasi oleh jasa ekosistem pengatur pengolahan dan pengurai limbah (JER 5) kelas rendah dengan luas 15.833,99 Ha atau 31,24%, yaitu pada kawasan permukiman. Klasifikasi ini menggambarkan bahwa kemampuan alam untuk pengaturan pengelolaan limbah adalah rendah. Volume sampah yang dihasilkan lebih banyak serta mengandung bahan kimia atau berbahaya, tidak mampu dikelola secara alami oleh alam sehingga memerlukan bantuan manusia. Potensi timbulan sampah yang dihasilkan penduduk Kabupaten Bantul sebesar 608.731,64 m<sup>3</sup>/th Jumlah yang tertangani sebanyak 452.185,43 m<sup>3</sup>/th atau 74,28%. Perlu peningkatan dalam pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat dan desa. Harapannya sampah selesai di tingkat desa.

- **Bencana**

Wilayah kabupaten Bantul, berdasarkan perhitungan IRBI secara umum merupakan wilayah dengan risiko bencana tinggi

sekali, yaitu 187,2. Potensi risiko bencana yang dimiliki sebanyak 9 (Sembilan) potensi risiko dengan risiko tinggi masing-masing. Sembilan potensi ini menjadi ancaman yang harus dihadapi dan diantisipasi oleh masyarakat. Target manajemen bencana dalam hal ini *Respon Time* 15 menit telah tercapai dan perlu ditingkatkan.

#### **4) Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 adalah sebesar 76,43 (BB) dengan kategori Baik, meningkat dari tahun 2016 sebesar 67,43 (B) dengan kategori Cukup Baik. Kategori BB memiliki interpretasi bahwa secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja. Upaya yang dilakukan agar pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja meningkat adalah dengan memastikan bahwa setiap pegawai memahami tugas pokok dan fungsinya serta indikator kinerjanya.

Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi, pada komponen Reform diperoleh nilai kecil. Upaya untuk meningkatkan nilai komponen Reform perlu dilakukan deregulasi kebijakan yang merupakan salah satu unsur dalam komponen Reform terutama pada penyederhanaan peraturan perundangan, mengeliminasi peraturan perundangan yang tumpang tindih yang menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan.

Hal ini sejalan dengan penerapan UUCK yang mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melakukan perubahan, pencabutan atau menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan atas visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi dan Misi RPJMD tahun 2021-2026 selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul, RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta selaras juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

### 5.1. Visi

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai, dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan. Berdasarkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis,  
Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945  
dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”**

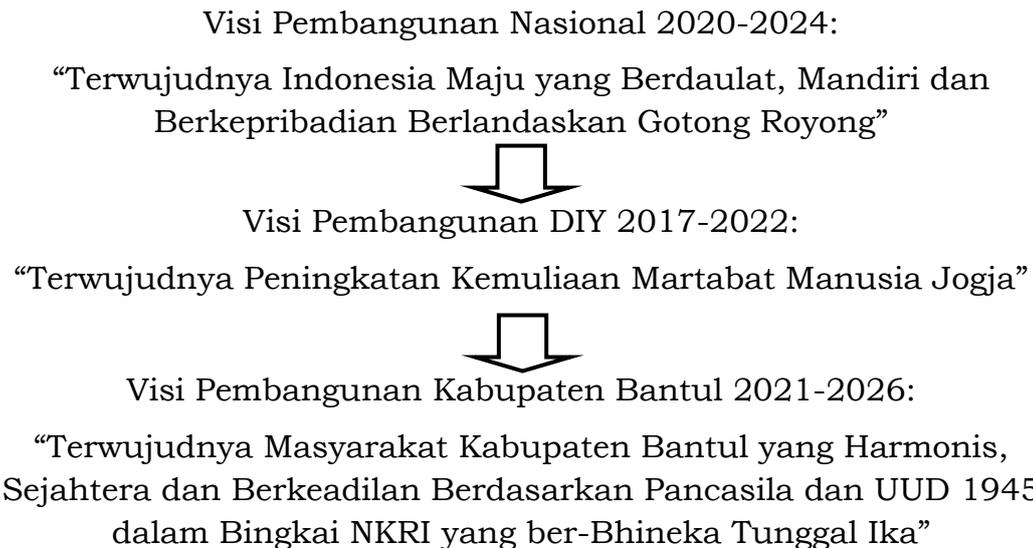
Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5 1 Keselarasan Visi RPJMN, RPJMD DIY, dan Visi RPJMD Kabupaten Bantul

## 5.2. Misi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.

2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.

3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.

5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

Misi ini mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

Keselarasan misi pembangunan RPJMN, RPJMD Provinsi DIY dan RPJMD Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

Tabel 5 1 Keselarasan Misi Pembangunan RPJMN, RPJMD Provinsi DIY dan RPJMD Kabupaten Bantul

No.	Misi Pembangunan Nasional 2020 -2024	Misi Pembangunan DIY 2017- 2022	Misi Pembangunan Bantul 2021 - 2026
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi 1 Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Misi 2 Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, Berkarakter dan Berbudaya Istimewa
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Misi 1 Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Misi 3 Pendayagunaan Potensi Lokal dengan Penerapan Teknologi dan Penyerapan Investasi Berorientasi pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Misi 1 Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Misi 3 Pendayagunaan Potensi Lokal dengan Penerapan Teknologi dan Penyerapan Investasi Berorientasi pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Misi 1 Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Misi 4 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Infrastruktur dan Pengelolaan Risiko Bencana
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Misi 1 Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Misi 2 Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, Berkarakter dan Berbudaya Istimewa
6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	Misi 2 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Misi 1 Penguatan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima
7	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	Misi 2 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Misi 5 Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial Secara Terpadu dan

No.	Misi Pembangunan Nasional 2020 -2024	Misi Pembangunan DIY 2017- 2022	Misi Pembangunan Bantul 2021 - 2026
			Pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan, Lansia Dan Difabel
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	Misi 2 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Misi 1 Penguatan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima
9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	Misi 2 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Misi 1 Penguatan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima

Keselarasan misi RPJP Kabupaten Bantul dengan misi RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 5 2 Keselarasan Misi RPJP Kabupaten Bantul dengan Misi RPJMD Tahun 2021-2026

Misi RPJPD Bantul untuk RPJMD Ke-4 (2020-2025)	Misi RPJMD Tahun 2021 - 2026
Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Empatik dan Bertanggung Jawab	Misi 1 Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel Dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima
Misi 1 Mewujudkan Kesejahteraan Lahir dan Batin dengan Memanfaatkan Sumber Daya Lokal, Berwawasan Lingkungan dan Menitikberatkan pada Pengurangan Risiko Bencana, serta Berdasarkan pada Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	Misi 2 Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, Berkarakter dan Berbudaya Istimewa
Misi 1 Mewujudkan Kesejahteraan Lahir dan Batin dengan Memanfaatkan Sumber Daya Lokal, Berwawasan Lingkungan dan Menitikberatkan pada Pengurangan Risiko Bencana, serta Berdasarkan pada Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	Misi 3 Pendayagunaan Potensi Lokal dengan Penerapan Teknologi dan Penyerapan Investasi Berorientasi pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
Misi 1 Mewujudkan Kesejahteraan Lahir dan Batin dengan Memanfaatkan Sumber Daya Lokal, Berwawasan Lingkungan	Misi 4 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Infrastruktur dan Pengelolaan Risiko Bencana

<b>Misi RPJPD Bantul untuk RPJMD Ke-4 (2020-2025)</b>	<b>Misi RPJMD Tahun 2021 - 2026</b>
dan Menitikberatkan pada Pengurangan Risiko Bencana, serta Berdasarkan pada Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	
Misi 1 Mewujudkan Kesejahteraan Lahir dan Batin dengan Memanfaatkan Sumber Daya Lokal, Berwawasan Lingkungan dan Menitikberatkan pada Pengurangan Risiko Bencana, serta Berdasarkan pada Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	Misi 5 Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial Secara Terpadu dan Pencapaian Bantul Sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan, Lansia dan Difabel

### 5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

Dalam penentuan target indikator kinerja secara umum dihitung berdasarkan data tren tahun 2016-2019 serta diasumsikan kondisi perekonomian stabil, tidak terjadi gejolak sosial dan politik serta tidak terjadi bencana besar. Berikut visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2021-2026.

Tabel 5 3 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021-2026

**VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika**

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)
								2022	2023	2024	2025	2026	
1	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,43 (BB)	78,00 (BB)	80,00 (BB)	82,00 (BB)	82,5 (BB)	83,25 (BB)	83,75 (BB)	83,75 (BB)
				Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	3,4463	4,0815	4,1315	4,1815	4,2315	4,2815	4,3315
			Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja <i>Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK</i>	Nilai	80,67	82	82,5	83,5	83,75	84	84,5	84,5	
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,24	3,24	3,25	3,30	3,35	3,40	3,45	3,45	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	88,03	88,03	88,1	88,4	88,8	89,1	89,5	89,5	
2	Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80,01	80,02	80,63	81,09	81,54	81,99	82,44	82,44

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	
								2022	2023	2024	2025	2026		
			Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,86	73,9	74,01	74,11	74,2	74,29	74,39	74,39	
			Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,17	15,19	15,22	15,25	15,26	15,3	15,32	15,32	
			Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya	Desa /Kalurahan Pamor Budaya	Kalurahan	1	3	4	6	8	10	12	12	
		Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya		Indeks Rasa Aman	Indeks	n/a	n/a	2,7	2,73	2,76	2,79	2,81	2,81	
				Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
				3	Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,66	3,12	3,8	3,97	4,48	4,83
Terwujudnya pemerataan pendapatan	Rasio Gini	Angka	0,381			0,370	0,360	0,350	0,325	0,320	0,310	0,310		
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,06			4,06	3,9	3,5	3,4	3,3	3,2	3,2		
			Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	n/a	n/a	80	90	100	100	100	100		

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)
								2022	2023	2024	2025	2026	
4	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana	Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan		Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	n/a	n/a	73,71	75,05	76,40	77,47	79,08	79,08
			Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Indeks kualitas infrastruktur	Indeks	n/a	n/a	75,13	76,90	78,68	80,46	82,24	82,24
				Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75,01	80,00	75,03	75,05	75,07	75,10	75,20	75,20
			Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,02	63,02	62,75	63,59	64,42	65,24	66,07	66,07
			Terwujudnya penurunan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	187,20	181,26	175,51	169,94	164,55	159,33	154,27	154,27
5	Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel	Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat		Tingkat Kemiskinan	Persen	13,50	13,50	13,77	12,90	12,50	12,05	11,50	11,50
			Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS))	Orang	72.101	72.101	72.296	71.667	71.380	71.059	70.688	70.668
			Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,12	95,18	95,50	96,00	96,50	96,75	96,90	96,90
			Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	64,78	n/a	69,36	71,01	72,66	74,31	75,96	75,96
				Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Nindya	Utama	Utama	KLA	KLA	KLA

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , 2021